



ANALISIS STUDI LITERATUR: STRATEGI OPTIMALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK PENDIDIKAN DASAR BERKUALITAS

Alfiani Nur Julia¹, Masduki Ahmad²
^{1,2} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: alfiaani30@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.625>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 May 2025
Final Revised: 11 May 2025
Accepted: 16 June 2025
Published: 27 June 2025

Keywords:

School Operational Assistance
Basic Education
Education Quality
Optimization Strategy
Literature Review



ABSTRAK

The School Operational Assistance (BOS) program is a strategic policy of the Indonesian government aimed at supporting the operational financing of basic education and ensuring equitable and inclusive access to quality education. However, the utilization of BOS funds at the school level has often not been fully effective in enhancing the quality of learning. This study aims to analyze strategies for optimizing the use of BOS funds through a literature review of 30 national and international academic journals published between 2021 and 2025. The method employed is a systematic literature review, focusing on scholarly documents that meet inclusion criteria based on topic relevance, publication year, and academic credibility. The findings indicate that while BOS has significantly contributed to the sustainability of basic education services, its use remains largely administrative and insufficiently focused on quality improvement efforts such as teacher development, literacy and numeracy programs, and inclusive education initiatives. Challenges in BOS implementation include limited managerial capacity at schools, delays in disbursement, low community involvement, and inflexible policy guidelines. Therefore, reforms are needed in planning, supervision, and technical guidance to make BOS more adaptive to local needs and quality-oriented.

ABSTRAK

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mendukung pembiayaan operasional pendidikan dasar serta menjamin akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, pemanfaatan dana BOS di tingkat satuan pendidikan sering kali belum sepenuhnya efektif dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penggunaan BOS melalui pendekatan studi literatur terhadap 30 jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan tahun 2021–2025. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematis, dengan menelaah dokumen ilmiah yang relevan dan memenuhi kriteria inklusi berdasarkan topik, rentang tahun, dan validitas akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun BOS telah memberikan kontribusi besar terhadap kelangsungan operasional sekolah dasar, penggunaannya masih dominan pada kebutuhan administratif dan kurang diarahkan pada penguatan mutu, seperti peningkatan kompetensi guru, program literasi dan numerasi, serta pendidikan inklusif. Hambatan dalam implementasi BOS mencakup rendahnya kapasitas manajerial sekolah, keterlambatan pencairan, minimnya pelibatan masyarakat, serta keterbatasan fleksibilitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam perencanaan, pengawasan, serta penyusunan petunjuk teknis BOS agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan berorientasi pada mutu.

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah, Pendidikan Dasar, Mutu Pendidikan, Strategi Optimalisasi, Studi Literatur

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan fase awal dan fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di era global. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan dasar menjadi tanggung jawab negara untuk diselenggarakan secara merata, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan strategis, berupaya mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, salah satunya melalui mekanisme pembiayaan langsung ke sekolah berupa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini telah menjadi tulang punggung pendanaan bagi mayoritas sekolah dasar, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber pembiayaan lain (Kemendikbud, 2020).

Program BOS diluncurkan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Dalam pelaksanaannya, BOS menjadi instrumen fiskal yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan melalui pendanaan kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan alat tulis, buku ajar, perawatan sarana prasarana, honorarium guru tidak tetap, serta pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran lainnya (Permendikbud No. 63 Tahun 2022). Dengan kata lain, BOS diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan dari peserta didik sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Namun demikian, efektivitas program BOS dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan masih menjadi persoalan yang terus dibahas dalam berbagai studi. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun BOS mampu menjaga keberlangsungan operasional sekolah, belum semua satuan pendidikan mampu mengelola dana ini secara optimal untuk mendorong pencapaian standar nasional pendidikan. Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan dana, rendahnya kapasitas bendahara dan kepala sekolah dalam manajemen keuangan, keterlambatan pencairan dana, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi tantangan yang menghambat fungsi strategis program BOS (Susanto, 2019; Yuliana et al., 2021).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Rahmawati & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan dana BOS masih didominasi oleh pembiayaan kegiatan rutin dan administratif, sementara alokasi untuk program-program peningkatan mutu pembelajaran masih relatif kecil. Sementara itu, Fauzi (2020) menekankan bahwa petunjuk teknis yang kaku serta kurangnya fleksibilitas penggunaan dana BOS telah membatasi ruang inovasi sekolah, khususnya dalam mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program BOS dengan realitas implementasinya di lapangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian literatur secara sistematis guna mengidentifikasi strategi-strategi optimalisasi program BOS yang telah dikembangkan atau diusulkan dalam berbagai penelitian terdahulu. Studi literatur ini memiliki urgensi karena mampu merangkum pengetahuan empiris dan teoritis mengenai praktik terbaik (*best practices*), hambatan implementasi, serta model pengelolaan BOS yang adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan pendidikan dasar yang terus berkembang. Menurut Creswell (2012), studi literatur yang sistematis dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, karena bersifat komprehensif dan berbasis bukti.

Dalam konteks pendidikan dasar yang berkualitas, optimalisasi dana BOS tidak hanya

menyangkut efisiensi penggunaan dana, tetapi juga mencakup bagaimana dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembelajaran yang bermakna, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, strategi optimalisasi BOS harus melibatkan berbagai pendekatan, seperti pelibatan partisipatif dalam perencanaan anggaran, penguatan kapasitas pengelola sekolah, integrasi teknologi informasi untuk transparansi, serta reformulasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi sekolah di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis literatur mengenai strategi optimalisasi program BOS dalam rangka mendukung pendidikan dasar yang berkualitas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*). Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis dan mensintesis berbagai temuan ilmiah serta kebijakan yang telah dipublikasikan sebelumnya terkait dengan strategi optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer, melainkan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber akademik yang telah tersedia dan terpublikasi secara sah.

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria ketat, yaitu harus relevan langsung dengan topik pembiayaan pendidikan, khususnya program BOS di tingkat pendidikan dasar, serta dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir 5 tahun terakhir. Sumber data diperoleh dari beberapa basis data ilmiah nasional dan internasional seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), DOAJ, serta situs resmi pemerintah seperti Kemendikbudristek dan BPK. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi: "BOS", "Bantuan Operasional Sekolah", "pembiayaan pendidikan dasar", "mutu pendidikan dasar", dan "strategi pengelolaan dana BOS".

Dari hasil penelusuran dan seleksi pustaka, diperoleh sebanyak 30 artikel jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis dalam studi ini. Seluruh jurnal tersebut merupakan publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang terbit dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, serta relevan dengan topik pengelolaan dan optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di pendidikan dasar. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tahun publikasi, tidak berasal dari sumber ilmiah yang dapat diverifikasi, atau bersifat opini tanpa dukungan data empiris, tidak disertakan dalam analisis. Fokus utama kajian diarahkan pada temuan yang secara langsung membahas kebijakan, efektivitas penggunaan, pengelolaan, serta dampak BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia.

Proses analisis dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan literatur berdasarkan fokus temanya, seperti: efektivitas penggunaan dana BOS, tantangan implementasi di lapangan, model manajemen dana yang efektif, serta dampak penggunaan BOS terhadap mutu pembelajaran dan tata kelola sekolah. Setelah dilakukan klasifikasi, peneliti menyusun sintesis naratif untuk menemukan pola-pola umum, praktik terbaik, serta celah atau tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Temuan ini kemudian menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategi optimalisasi pengelolaan BOS yang adaptif terhadap konteks pendidikan dasar di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi tulang punggung pendanaan pendidikan dasar di Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya kebijakan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang layak. BOS mencakup berbagai komponen, mulai dari biaya operasional, administrasi, hingga dukungan terhadap program pengembangan pembelajaran. Dalam praktiknya, BOS telah menjadi satu-satunya sumber keuangan utama di sebagian besar sekolah negeri, terutama di wilayah yang secara ekonomi tergolong lemah (Kurniawan, 2021; Prasetyo, 2022; Rachmawati & Lestari, 2022). Dengan demikian, peran BOS sangat signifikan dalam menjamin keberlangsungan sistem pendidikan dasar.

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), BOS menjadi penopang utama aktivitas pendidikan, mengingat lemahnya kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan sekolah. Sekolah-sekolah di wilayah ini umumnya tidak mampu mengakses sumber pendanaan alternatif, seperti iuran komite atau dukungan lembaga lokal. Sebuah studi oleh Handayani dan Rahmadani (2023) memperlihatkan bahwa 85% sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur dan Papua mengandalkan BOS secara penuh untuk operasional harian, dari pengadaan alat tulis, perbaikan ringan infrastruktur, hingga honor guru tidak tetap. Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan Maulana (2021) dan Lukman & Sari (2021), yang menyoroti keterbatasan fiskal di tingkat daerah. Oleh sebab itu, BOS tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi merupakan sumber utama kelangsungan pendidikan di daerah tertinggal.

Meskipun peran BOS vital, banyak studi menunjukkan bahwa alokasinya belum sepenuhnya diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebagian besar dana digunakan untuk keperluan administratif, seperti listrik, ATK, atau kegiatan rutin sekolah lainnya. Ardiansyah (2023) dan Sutrisno (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% sekolah masih menggunakan dana BOS tanpa orientasi strategis terhadap peningkatan proses belajar mengajar. Kegiatan pengembangan guru, penyediaan bahan ajar inovatif, atau pembelajaran berbasis teknologi masih jarang menjadi prioritas anggaran. Bahkan, studi Yuliana (2023) menunjukkan bahwa BOS belum digunakan optimal untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus, meskipun peluang itu tersedia dalam juknis. Karena itu, perencanaan BOS harus dikaji ulang agar sejalan dengan visi peningkatan mutu pendidikan.

Kapasitas manajerial kepala sekolah dan tim pengelola anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan penggunaan dana BOS secara optimal. Sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan pemahaman kuat tentang manajemen keuangan dan perencanaan strategis menunjukkan kecenderungan lebih baik dalam mengalokasikan BOS secara efektif (Indriani, 2023; Hidayat, 2021). Pelatihan kepala sekolah secara rutin, pembentukan tim BOS yang profesional, serta keterbukaan terhadap inovasi menjadi karakteristik sekolah yang mampu menjadikan BOS sebagai alat peningkat mutu, bukan sekadar penopang administrasi. Firdaus & Kurniawan (2022) menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan di tingkat kepala sekolah dan bendahara. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah awal untuk optimalisasi BOS.

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi BOS adalah minimnya partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana. Keterlibatan komite sekolah seringkali hanya bersifat administratif, tanpa proses diskusi yang mendalam terkait kebutuhan sekolah. Dalam studi Rachmawati & Lestari (2022), hanya 27% sekolah yang melibatkan komite secara aktif dalam menyusun RKAS. Padahal, partisipasi masyarakat

dapat mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan riil. Putri & Hasan (2022) juga menyebutkan bahwa sekolah yang membuka akses informasi penggunaan BOS kepada orang tua cenderung memperoleh dukungan lebih tinggi. Dengan kata lain, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat merupakan kunci penguatan tata kelola dana BOS.

Selain partisipasi publik, ketepatan waktu dalam pencairan dana BOS menjadi faktor krusial bagi kelancaran kegiatan sekolah. Keterlambatan pencairan dapat menyebabkan terganggunya program pembelajaran yang telah direncanakan, bahkan memaksa sekolah untuk berutang atau menunda kegiatan penting. Studi oleh Maulana (2021) dan Syaiful (2023) menunjukkan bahwa 40% sekolah mengalami keterlambatan dalam pencairan triwulan pertama, yang berdampak pada terganggunya jadwal program semester. Ketidakpastian ini menyulitkan penyusunan kalender akademik dan perencanaan anggaran yang efisien. Beberapa sekolah bahkan terpaksa mengalihkan dana pribadi kepala sekolah sementara waktu untuk menutupi biaya mendesak (Nasution, 2022). Akibatnya, keberlangsungan kegiatan pendidikan menjadi sangat tergantung pada efisiensi sistem birokrasi pencairan dana.

Petunjuk teknis (juknis) BOS yang dirilis oleh Kemendikbudristek setiap tahun menjadi panduan utama sekolah dalam menggunakan dana, namun tidak jarang justru dianggap sebagai penghambat inovasi. Studi oleh Fauziah (2022) dan Rohmawati & Akbar (2023) mencatat bahwa banyak sekolah mengeluhkan kurangnya fleksibilitas dalam alokasi dana untuk pengembangan program unggulan seperti literasi digital, pelatihan guru tematik, atau pembelajaran berbasis proyek. Hal ini menyebabkan sekolah hanya berani mengalokasikan dana pada komponen yang sudah pasti diperbolehkan, tanpa mengeksplorasi potensi strategis lain. Di sisi lain, sekolah yang kreatif dan berani berinovasi sering kali justru menghadapi kendala administratif saat pelaporan. Oleh karena itu, penyusunan juknis sebaiknya memberikan ruang interpretasi terbimbing untuk sekolah sesuai konteks kebutuhan.

Kesenjangan pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan BOS antara sekolah kota dan sekolah desa juga menjadi temuan penting dalam sejumlah penelitian. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya lebih mudah mengakses pelatihan teknis pengelolaan BOS, sedangkan sekolah di daerah terpencil banyak yang belum pernah mendapatkan bimbingan sejak awal pengelolaan (Rahmat & Sari, 2022; Nursyam, 2022). Hal ini berdampak pada kemampuan menyusun RKAS, membuat laporan pertanggungjawaban, serta pemahaman terhadap prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Studi Fitriani & Yuliani (2023) menegaskan bahwa minimnya literasi pengelolaan anggaran berdampak pada banyaknya dana yang tidak terserap dengan maksimal setiap tahun. Karena itu, pemerataan pelatihan dan pendampingan mutlak diperlukan agar kualitas pengelolaan dana BOS tidak timpang antarwilayah.

BOS juga memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi pembelajaran daring dan hybrid. Namun, studi oleh Arifin (2021) dan Habibi (2023) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang memanfaatkan BOS untuk membeli perangkat digital, langganan platform pembelajaran, atau pelatihan guru dalam penggunaan TIK. Kebanyakan sekolah masih memandang BOS sebagai sumber pembiayaan untuk operasional fisik, bukan sebagai instrumen pembaruan pedagogi. Padahal, pengalokasian dana untuk pengembangan teknologi pembelajaran terbukti meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, penggunaan BOS untuk pembelajaran digital perlu ditegaskan dalam kebijakan dan juknis berikutnya.

Dalam konteks inklusi dan pemerataan, BOS berperan penting dalam menjamin bahwa sekolah dapat melayani siswa dengan berbagai kebutuhan, termasuk siswa dari kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Studi oleh Yuliana (2023) dan Zainuddin & Syakir (2024) menunjukkan bahwa BOS dapat dialokasikan untuk mendukung penyediaan alat bantu, pelatihan guru inklusif, dan adaptasi kurikulum di sekolah dasar. Namun, tidak semua sekolah menyadari atau mampu memanfaatkan fleksibilitas ini. Banyak sekolah belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang bagaimana mengintegrasikan kebijakan inklusi dalam perencanaan BOS. Akibatnya, siswa dengan kebutuhan khusus sering kali tidak mendapatkan layanan yang memadai. Karena itu, diperlukan panduan teknis khusus tentang pemanfaatan BOS dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana BOS, pemerintah telah memperkenalkan sistem pelaporan digital seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Firdaus & Kurniawan (2022) mencatat bahwa penggunaan ARKAS dapat meminimalkan kesalahan input manual, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta memudahkan proses verifikasi oleh dinas pendidikan. Namun, implementasi ARKAS masih menghadapi hambatan, terutama di wilayah yang belum memiliki infrastruktur TIK yang memadai. Sekolah-sekolah di daerah dengan koneksi internet rendah atau SDM yang belum terbiasa dengan aplikasi digital seringkali merasa terbebani dengan pelaporan daring. Prasetyo et al. (2023) menekankan bahwa pelatihan dan dukungan teknis sangat penting agar digitalisasi tidak justru menambah beban administratif. Dengan kata lain, keberhasilan digitalisasi BOS memerlukan sinergi antara penguatan infrastruktur, pelatihan SDM, dan pendampingan sistematis.

Monitoring dan evaluasi internal terhadap pemanfaatan dana BOS merupakan salah satu strategi penting dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan dan berdampak nyata terhadap mutu pendidikan. Hidayat (2021) menyarankan agar sekolah melakukan monitoring berkala yang melibatkan tim manajemen, komite sekolah, dan perwakilan guru. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, melainkan secara triwulanan untuk melihat progres, hambatan, dan potensi perbaikan penggunaan dana. Penelitian oleh Nasution (2022) menunjukkan bahwa sekolah yang menjalankan sistem monitoring internal secara terstruktur mengalami peningkatan efisiensi hingga 20% dalam penggunaan BOS. Sayangnya, belum semua sekolah memiliki sistem evaluasi seperti ini. Oleh sebab itu, penguatan budaya evaluatif di sekolah perlu menjadi bagian dari strategi nasional optimalisasi BOS.

BOS juga digunakan oleh banyak sekolah untuk memperbaiki dan merawat infrastruktur fisik seperti toilet, plafon, ruang kelas, dan pagar sekolah. Meski demikian, menurut studi oleh Wulandari & Rohmat (2022), masih terdapat banyak kasus di mana dana untuk fisik digunakan tanpa mempertimbangkan prinsip pedagogis. Misalnya, dana digunakan untuk renovasi ruang guru tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas belajar siswa. Selain itu, kegiatan pembangunan yang terlalu teknis terkadang menyebabkan dana habis tanpa menghasilkan peningkatan terhadap kualitas pembelajaran. Ardiansyah (2023) menekankan bahwa rehabilitasi fisik sebaiknya ditautkan langsung dengan tujuan peningkatan mutu, seperti perbaikan ruang literasi, ruang kelas kreatif, atau perpustakaan digital. Dengan begitu, pengeluaran fisik melalui BOS tidak hanya mempercantik bangunan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas belajar siswa.

Salah satu kritik yang sering muncul terhadap penggunaan dana BOS adalah pengalokasian untuk kegiatan yang kurang relevan dengan peningkatan pembelajaran. Putri & Hasan (2022) mencatat bahwa sebagian sekolah masih mengalokasikan dana BOS untuk kegiatan seremonial, jamuan, studi banding luar daerah yang tidak relevan, atau kegiatan

lomba yang tidak berdampak langsung terhadap siswa. Studi oleh Syafruddin & Lestari (2023) menyoroti bahwa kegiatan tersebut sering kali dilandasi keinginan pencitraan sekolah, bukan untuk penguatan kualitas akademik. Situasi ini menunjukkan masih lemahnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan anggaran. Maka dari itu, perlu adanya penguatan pengawasan dan penyalarsan alokasi BOS dengan program prioritas berbasis mutu.

Sebagaimana dijelaskan dalam arah kebijakan nasional, penguatan literasi dan numerasi menjadi prioritas utama dalam pendidikan dasar saat ini. Namun, studi oleh Syafri (2023) menunjukkan bahwa belum banyak sekolah yang secara eksplisit mengalokasikan dana BOS untuk mendukung program peningkatan literasi dan numerasi siswa. Padahal, pengadaan buku bacaan yang relevan, pelatihan guru dalam metode penguatan numerasi, dan kegiatan membaca terstruktur dapat dibiayai melalui BOS. Fitriani & Yuliani (2023) menambahkan bahwa sebagian guru belum memiliki kesadaran bahwa BOS dapat digunakan untuk kegiatan literasi berbasis kelas. Dengan demikian, perlu ada penegasan dalam juknis maupun pelatihan bahwa BOS adalah instrumen yang sah untuk mendukung transformasi pembelajaran mendasar.

Dalam konteks sekolah berbasis agama seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), penggunaan BOS seringkali perlu diselaraskan dengan nilai-nilai religius dan visi khas lembaga. Habibah (2023) dan Andayani & Muhaemin (2024) mengungkapkan bahwa beberapa SDIT menghadapi dilema dalam mengalokasikan dana untuk program keislaman yang tidak secara eksplisit tercantum dalam juknis BOS. Misalnya, pelatihan guru berbasis Qur'ani, kegiatan tahfidz, atau pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Sekolah khawatir pengeluaran tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan jika tidak dicantumkan secara rinci dalam juknis, meskipun manfaatnya sangat besar bagi peserta didik. Studi Siregar et al. (2025) menyarankan adanya ruang kebijakan adaptif yang mempertimbangkan karakteristik sekolah swasta berbasis agama. Dengan demikian, fleksibilitas yang tetap akuntabel menjadi solusi untuk optimalisasi BOS di sekolah-sekolah berbasis nilai.

Strategi optimalisasi BOS juga dapat dilakukan melalui sinergi dengan sumber pendanaan lain, seperti CSR perusahaan, sumbangan masyarakat, dan program filantropi pendidikan. Wulandari & Rohmat (2022) serta Indriani (2023) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang mampu menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga donor cenderung memiliki program peningkatan mutu yang lebih beragam dan berkelanjutan. BOS digunakan sebagai pondasi dasar, sementara dana tambahan digunakan untuk memperkuat inovasi atau fasilitas tambahan. Namun, belum semua kepala sekolah memiliki kapasitas jejaring dan advokasi untuk mengakses sumber pendanaan alternatif ini. Lukman & Sari (2021) menekankan perlunya pelatihan kepemimpinan kolaboratif bagi kepala sekolah. Oleh sebab itu, BOS perlu diposisikan bukan sebagai satu-satunya sumber dana, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan pendidikan yang lebih luas.

Dana BOS juga memiliki potensi besar untuk mendukung program remedial dan pengayaan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu berbasis capaian siswa. Studi oleh Zainuddin & Syakir (2024) dan Fitriani & Yuliani (2023) menyebutkan bahwa sangat sedikit sekolah yang secara eksplisit mengalokasikan dana BOS untuk kegiatan remedial bagi siswa dengan capaian belajar rendah. Kebanyakan fokus anggaran justru pada kegiatan massal, tanpa perhatian khusus pada kesenjangan individu siswa. Padahal, remedial learning terbukti menjadi intervensi penting dalam membantu siswa mencapai standar minimum kompetensi. Arifin (2021) menyarankan agar pelatihan perencanaan program sekolah memasukkan logika alokasi anggaran berbasis capaian siswa. Maka dari itu, optimalisasi

BOS harus dimulai dari pemetaan kebutuhan akademik siswa yang berbasis data.

Salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif dalam menyusun alokasi BOS adalah berbasis data kebutuhan dan performa sekolah. Indriani (2023) dan Prasetyo et al. (2023) menekankan bahwa penyusunan RKAS yang baik adalah yang menyertakan data hasil asesmen siswa, data ketidakhadiran, capaian literasi-numerasi, hingga data kesejahteraan siswa. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap alokasi dana memiliki justifikasi yang kuat dan berdampak langsung terhadap prioritas perbaikan sekolah. Sayangnya, banyak sekolah masih menyusun RKAS secara normatif, mengikuti template tahun sebelumnya tanpa proses refleksi. Dalam hal ini, studi oleh Hidayat (2021) mendorong penerapan pendekatan berbasis data dalam pelatihan BOS di tingkat kabupaten/kota. Sehingga, sekolah dapat menggunakan BOS untuk mengatasi permasalahan yang paling mendesak dan berdampak langsung terhadap mutu.

Berdasarkan tinjauan dari jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa BOS memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung tercapainya pendidikan dasar yang bermutu, inklusif, dan merata. Namun, berbagai tantangan seperti keterlambatan pencairan, keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya fleksibilitas kebijakan, dan lemahnya integrasi data masih menjadi penghambat dalam optimalisasi BOS. Studi-studi yang ditinjau menunjukkan bahwa sekolah yang mampu menjadikan BOS sebagai instrumen perencanaan strategis bukan hanya administrative memiliki capaian mutu yang lebih tinggi. Karenanya, dibutuhkan penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta mekanisme evaluasi yang responsif terhadap dinamika kebutuhan sekolah dasar saat ini. Dengan kata lain, optimalisasi dana BOS hanya akan berhasil jika dikelola secara terencana, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Pembahasan

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa peran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sangat sentral, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan fiskal. BOS berfungsi sebagai pendanaan utama untuk membiayai operasional harian sekolah, menggantikan peran dana dari masyarakat yang terbatas. Penelitian oleh Prasetyo (2022), Handayani & Rahmadani (2023), serta Rachmawati & Lestari (2022) menguatkan argumen bahwa BOS telah meningkatkan stabilitas operasional pendidikan dasar, terutama di daerah 3T. Kendati demikian, ketergantungan mutlak pada BOS juga menimbulkan risiko tersendiri jika tidak diimbangi dengan kemandirian sekolah dan diversifikasi sumber dana pendidikan lainnya.

Meskipun dana BOS secara umum telah mendukung aksesibilitas dan kelangsungan pendidikan dasar, efektivitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan masih menjadi tanda tanya. Banyak sekolah masih menggunakan BOS secara konservatif dan rutin, seperti untuk membayar honor guru tidak tetap, membeli alat tulis kantor, serta biaya listrik atau kebersihan sekolah. Studi oleh Sutrisno (2023) dan Ardiansyah (2023) mengungkapkan bahwa lebih dari 60% sekolah belum mengalokasikan dana BOS secara signifikan untuk kegiatan pengembangan pembelajaran, seperti pelatihan guru, penyediaan bahan ajar berbasis teknologi, atau evaluasi pembelajaran. Akibatnya, peningkatan kualitas belajar siswa tidak berjalan paralel dengan peningkatan input administratif yang dibiayai BOS.

Ketidakefektifan penggunaan BOS dalam mendukung mutu juga tidak lepas dari lemahnya kapasitas perencanaan dan manajemen sekolah. Banyak kepala sekolah dan bendahara BOS belum sepenuhnya memahami prinsip pengelolaan keuangan berbasis kinerja atau berbasis capaian pembelajaran. Penelitian oleh Hidayat (2021), Indriani (2023), dan Firdaus & Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan dana BOS

masih belum merata dan cenderung bersifat administratif. Padahal, strategi optimalisasi BOS sangat bergantung pada kualitas perencanaan RKAS yang mempertimbangkan data kebutuhan, prioritas mutu, dan proyeksi capaian pembelajaran.

Selain itu, kurangnya pelibatan publik dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan BOS turut memperlemah akuntabilitas anggaran. Studi oleh Rachmawati & Lestari (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang melibatkan komite secara bermakna dalam menyusun RKAS. Akibatnya, proses alokasi dana cenderung tertutup dan minim masukan dari pihak eksternal. Dalam konteks good governance, semestinya pelaksanaan BOS tidak hanya transparan dalam pelaporan administratif, tetapi juga partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan. Hal ini penting untuk menjaga integritas serta kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan riil sekolah dan peserta didik.

Salah satu tantangan lain yang signifikan adalah keterlambatan pencairan dana BOS yang kerap terjadi, khususnya pada triwulan pertama tahun anggaran. Keterlambatan ini menyebabkan stagnasi aktivitas pembelajaran, penundaan belanja kebutuhan mendesak, bahkan utang ke pihak ketiga. Studi oleh Maulana (2021), Syaiful (2023), dan Nasution (2022) mengonfirmasi bahwa sistem pencairan yang tidak responsif berpotensi mengganggu kelancaran proses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem distribusi dan sinkronisasi administrasi pusat-daerah agar dana BOS dapat dicairkan tepat waktu dan digunakan secara optimal sejak awal tahun ajaran.

Di sisi lain, transformasi digital yang diterapkan dalam pelaporan dana BOS melalui aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dinilai mampu mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan transparansi penggunaan dana. Meski begitu, studi oleh Prasetyo et al. (2023) dan Fitriani & Yuliani (2023) mengindikasikan bahwa belum semua sekolah siap menghadapi digitalisasi ini. Terbatasnya infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan pengelola keuangan sekolah masih menjadi hambatan. Maka dari itu, digitalisasi BOS harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis, dan pembenahan jaringan internet, khususnya di daerah rural.

BOS sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk mendukung berbagai program prioritas nasional seperti literasi, numerasi, dan pendidikan inklusif. Sayangnya, fleksibilitas ini belum dimaksimalkan oleh sekolah. Banyak kepala sekolah masih berpegang pada penafsiran konservatif atas juknis BOS yang menyebabkan mereka ragu mengalokasikan dana untuk kegiatan seperti pelatihan guru inklusif, pembelajaran berbasis teknologi, atau penyediaan bahan ajar khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Temuan dari Yuliana (2023), Syafri (2023), dan Zainuddin & Syakir (2024) memperlihatkan bahwa kesadaran terhadap dimensi strategis BOS dalam mendukung keberagaman dan kesetaraan pembelajaran masih rendah.

Selain itu, sekolah-sekolah swasta berbasis keagamaan seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) menghadapi tantangan dalam menyelaraskan penggunaan BOS dengan misi religius lembaga. Penelitian oleh Habibah (2023) dan Siregar et al. (2025) menunjukkan bahwa dana BOS seringkali tidak dapat digunakan untuk mendukung program seperti pembinaan akhlak, pelatihan guru tahfidz, atau penguatan kurikulum integratif Islam yang menjadi ciri khas SDIT. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian juknis yang memberikan ruang interpretasi lokal secara terbimbing, agar BOS tetap sesuai dengan akuntabilitas negara namun mampu mendukung kekhasan lembaga pendidikan.

Optimalisasi BOS juga akan jauh lebih efektif jika disinergikan dengan sumber dana lain seperti bantuan pemerintah daerah, dana CSR perusahaan, atau kontribusi masyarakat. Studi oleh Wulandari & Rohmat (2022) serta Lukman & Sari (2021) mengungkap bahwa

sekolah-sekolah yang membangun kemitraan pendanaan memiliki daya jangkauan program yang lebih luas dan berkelanjutan. Di sinilah peran kepemimpinan kepala sekolah menjadi penting—tidak hanya sebagai manajer internal, tetapi juga sebagai fasilitator kolaborasi eksternal. Maka, pendekatan optimalisasi BOS idealnya diarahkan untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem pendanaan pendidikan secara holistik.

Berdasarkan keseluruhan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi BOS harus mencakup dimensi perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, serta adaptasi kebijakan yang kontekstual. BOS bukan hanya anggaran teknis, melainkan instrumen strategis untuk mencapai pendidikan dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Oleh sebab itu, kebijakan dan implementasi BOS ke depan harus terus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan satuan pendidikan, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur dari lebih dari yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan strategis yang telah memberikan kontribusi besar terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia, terutama dalam menjamin akses pendidikan yang lebih merata. BOS telah menjadi tulang punggung pembiayaan bagi sebagian besar sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah-sekolah yang tidak memiliki alternatif sumber dana lain. Namun, efektivitas dana BOS dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan masih belum optimal. Mayoritas satuan pendidikan masih menggunakan BOS untuk kebutuhan operasional rutin seperti belanja ATK, pembayaran honor guru tidak tetap, dan biaya kebersihan, sementara investasi jangka panjang dalam bentuk peningkatan kompetensi guru, penguatan literasi-numerasi, serta dukungan pembelajaran berbasis teknologi masih sangat minim. Kurangnya pemahaman atas potensi strategis dana BOS, ditambah dengan keterbatasan kapasitas manajerial di sekolah dan pelaksanaan perencanaan yang tidak berbasis data, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan fungsi BOS sebagai instrumen peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan BOS di banyak sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti keterlambatan pencairan dana, lemahnya pelibatan masyarakat dan komite sekolah, serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi pelaporan keuangan seperti ARKAS. Kesenjangan antarwilayah juga tampak nyata, di mana sekolah-sekolah di wilayah urban cenderung memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang lebih baik dibanding sekolah di daerah rural atau terpencil. Bahkan, sekolah swasta berbasis keagamaan seperti SD Islam Terpadu (SDIT) menghadapi hambatan dalam menggunakan dana BOS untuk kegiatan-kegiatan khas keislaman yang tidak secara eksplisit tercantum dalam juknis. Kebijakan BOS yang terlalu kaku justru membatasi ruang inovasi sekolah, padahal fleksibilitas sangat dibutuhkan agar sekolah dapat menyesuaikan alokasi dana dengan visi dan konteks lokal. BOS juga belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan inklusif, remedial learning, atau pengayaan siswa berbasis capaian individual, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu secara menyeluruh. Ketidakterhubungan antara perencanaan RKAS dan data akademik siswa menunjukkan bahwa BOS masih dikelola lebih sebagai kewajiban administratif ketimbang sebagai alat perbaikan kualitas pendidikan.

Implikasi dari temuan ini menuntut adanya reformasi kebijakan dan praktik pengelolaan dana BOS yang lebih responsif dan strategis. Pemerintah perlu mengembangkan

petunjuk teknis yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik satuan pendidikan. Sekolah perlu diberi ruang yang cukup untuk berinovasi, selama penggunaan dana tetap dalam prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Penguatan kapasitas kepala sekolah, bendahara, dan tim perencana BOS harus menjadi prioritas melalui pelatihan yang berkelanjutan, bimbingan teknis, dan pendampingan berbasis wilayah. Selain itu, keterlibatan masyarakat, komite sekolah, serta penguatan transparansi melalui digitalisasi laporan BOS perlu diperkuat. Dalam jangka panjang, BOS juga perlu diposisikan bukan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan, melainkan bagian dari ekosistem pendanaan pendidikan yang saling melengkapi, seperti dana APBD, CSR, filantropi, dan partisipasi publik. Dengan strategi optimalisasi yang terencana, partisipatif, dan berbasis data, BOS dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong transformasi pendidikan dasar yang lebih inklusif, merata, dan bermutu tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENSI

- Andayani, R., & Muhaemin, A. (2024). Optimalisasi BOS dalam mendukung pembelajaran karakter di SDIT. *Jurnal Pendidikan Islam Dasar*, 9(1), 45–57.
- Ardiansyah, H. (2023). Efektivitas BOS dalam penguatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar*, 7(2), 112–123.
- Arifin, M. (2021). Dana BOS sebagai alat transformasi pembelajaran berbasis TIK. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(3), 201–210.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022 – Sektor pendidikan. <https://www.bpk.go.id>
- Fauziah, N. (2022). Hambatan implementasi juknis BOS dan dampaknya terhadap inovasi sekolah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 6(1), 88–99.
- Firdaus, R., & Kurniawan, S. (2022). Penerapan ARKAS dalam pengelolaan BOS berbasis digital. *Jurnal Kebijakan dan Teknologi Pendidikan*, 5(2), 67–78.
- Fitriani, D., & Yuliani, S. (2023). BOS dan penguatan program literasi di sekolah dasar. *Jurnal Literasi dan Numerasi*, 8(1), 54–66.
- Fitriani, D., & Yuliani, S. (2024). Dana BOS dan program remedial untuk peningkatan mutu. *Jurnal Intervensi Pendidikan Dasar*, 6(2), 59–73.
- Habibah, L. (2023). Kebijakan BOS pada sekolah berbasis Islam: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 134–147.
- Handayani, T., & Rahmadani, A. (2023). Peran BOS dalam pemerataan akses pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan*, 4(1), 20–32.
- Hidayat, F. (2021). Meningkatkan kapasitas perencanaan BOS berbasis data. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 90–101.
- Indriani, R. (2023). Strategi sinergi BOS dengan pendanaan alternatif. *Jurnal Inovasi Kebijakan Pendidikan*, 3(1), 33–47.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. <https://jdih.kemendagri.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165963/permen-nomor-6-tahun-2021>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Laporan Evaluasi Program BOS 2021. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2023.

<https://bos.kemdikbud.go.id>

- Kurniawan, T. (2021). Evaluasi distribusi BOS di daerah 3T. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(1), 55-67.
- Lukman, H., & Sari, D. (2021). Kepemimpinan kolaboratif dalam pengelolaan dana BOS. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 6(2), 98-109.
- Maulana, A. (2021). Dampak keterlambatan pencairan BOS terhadap kegiatan sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 4(1), 12-23.
- Nasution, E. (2022). BOS sebagai alat perencanaan strategis berbasis capaian siswa. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 5(3), 120-133.
- Nursyam, U. (2022). Tantangan pelatihan BOS bagi sekolah desa. *Jurnal Pendidikan Daerah*, 7(1), 41-53.
- Prasetyo, Y., et al. (2023). Digitalisasi pelaporan BOS di sekolah dasar. *Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*, 2(2), 77-89.
- Putri, R. D., & Hasan, N. (2022). Penyimpangan penggunaan dana BOS dalam kegiatan nonprioritas. *Jurnal Etika dan Kebijakan Publik*, 5(1), 14-27.
- Rachmawati, E., & Lestari, M. (2022). Partisipasi publik dalam pengawasan BOS. *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(2), 110-124.
- Rahmat, F., & Sari, A. (2022). Ketimpangan pelatihan BOS antarwilayah. *Jurnal Pendidikan Pedesaan*, 6(1), 23-34.
- Rohmawati, S., & Akbar, T. (2023). Respon sekolah terhadap revisi juknis BOS. *Jurnal Reformasi Kebijakan Pendidikan*, 3(2), 99-111.
- Siregar, H., Syahputra, I., & Nabila, Y. (2025). Implementasi BOS di sekolah Islam terpadu. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 2(1), 13-28.
- Sutrisno, B. (2023). Analisis efektivitas penggunaan BOS dalam pembelajaran. *Jurnal Evaluasi dan Monitoring Pendidikan*, 10(2), 72-84.
- Syaiful, M. (2023). Strategi percepatan penyaluran BOS oleh pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pendidikan*, 7(1), 50-62.
- Syafruddin, D., & Lestari, Y. (2023). BOS dan orientasi kegiatan seremonial di sekolah dasar. *Jurnal Praktik Pendidikan*, 4(2), 45-58.
- Syafri, A. (2023). BOS dan implementasi program literasi nasional. *Jurnal Literasi Indonesia*, 6(1), 15-29.
- Wulandari, A., & Rohmat, A. (2022). BOS dalam perbaikan fisik vs peningkatan mutu. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 7(3), 88-100.
- Wulandari, M., & Lestari, A. (2023). BOS dan pengembangan profesional guru. *Jurnal Profesi Pendidikan*, 9(1), 77-89.
- Yuliana, R. (2023). BOS dan akses pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. *Jurnal Inklusi Pendidikan*, 4(1), 37-49.
- Zainuddin, H., & Syakir, F. (2024). Strategi BOS untuk pembelajaran inklusif dan diferensiatif. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 5(2), 102-117.